

**SUBSIDI PEMBELIAN MOTOR LISTRIK RODA DUA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT**

Ismaya Indri Astuti^{1*}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

*Corresponding author: ismayaindri@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 12-10-2023
Revised : 14-11-2023
Accepted : 28-11-2023
Published : 05-06-2024

Keywords:

Subsidies, Electric Motors
Vihacle, Purchasing Power,
Industrial Revolution.

ABSTRACT

The Indonesian Government's commitment to entering the Industrial Revolution 4.0 era is demonstrated by the launch of the Making Indonesia 4.0 movement. Making Indonesia 4.0 has focused on five manufacturing sectors, including the food and beverage industry, textiles and clothing, chemicals, automotive and electronics. In the automotive and electronics sector, we strive to become the largest car manufacturer in ASEAN and develop the capabilities of the domestic electronics sector industry. As a form of effort to accelerate the formation of an electric vehicle ecosystem, the Government issued a policy regarding the expansion of recipients of the assistance program for purchasing two-wheeled electric motorbikes. This policy was marked by the issuance of Minister of Industry Regulation number 21 of 2023 concerning Amendments to Minister of Industry Regulation number 6 of 2023 concerning Guidelines for Providing Government Assistance for the Purchase of Two-Wheeled Battery-Based Electric Motorized Vehicles. This research uses a descriptive qualitative method, which will discuss providing subsidies for the purchase of two-wheeled electric motorbikes to increase people's purchasing power. This research is supported by literature data related to subsidies for electric motorbikes and sales of electric motorbikes, as well as various policy documents, regulations and legislation related to the provision of subsidies, as well as data related to the use of two-wheeled electric motorbikes in Indonesia. With the issuance of a policy from the Ministry of Industry, this research can answer the problem that we want to research, namely that providing subsidies can increase the selling value of electric motorbikes so that they can compete in the market.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2011 negara Indonesia telah memasuki era Industri 4.0 merupakan perubahan trend pada industri-industri di dunia yang menggabungkan antara kecanggihan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Upaya transformasi industri ditandai dengan

banyak bermunculan revolusi baru dalam bidang teknologi digital dan berkembangnya *internet of thing* (IoT) serta robot pintar yang memungkinkan manusia dapat mengoptimalkan fungsi otak (Venti, 2018). Perubahan teknologi yang sangat cepat ini telah memberikan dampak

pada beberapa sektor industri yang ada di Indonesia.

Revolusi Industri 4.0 tidak hanya berdampak pada bidang teknologi saja namun juga mendisrupsi bidang sosial (Banu & Umi, 2018). Menurut Kawai & Wignaraja (2007) negara-negara di Eropa dan sebagian di Asia seperti Jepang, Cina, Korea, India dan Thailand, baik negara maju maupun berkembang telah memasukkan gerakan *Making 4.0* kedalam agenda nasional mereka sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar global. Bagi Indonesia, era Revolusi Industri 4.0 memberikan banyak peluang untuk merevitalisasi sektor-sektor industri dalam negeri dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Upaya percepatan peningkatan ini membutuhkan pembuatan kebijakan yang menjadi tugas pemerintah (Aryani & Tambunan, 2022). Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian bahwa industri merupakan salah satu pilar ekonomi dan memiliki peran yang sangat besar untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain.

Komitmen Pemerintah Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0 ditunjukkan dengan diluncurkannya gerakan *Making Indonesia 4.0*. *Making Indonesia 4.0* merupakan program pemerintah dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang sedang mentransformasi dunia. Sejalan dengan gerakan *Making Indonesia 4.0* yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif *Making Indonesia 4.0* untuk mengimplementasikan strategi dan *roadmap* Revolusi Industri 4.0. Pengimplementasian *roadmap* tersebut tentu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan. Seperti yang di-highlight Apriliyanto (2021) bahwa implementasi kebijakan

merupakan proses yang berhubungan erat dengan unsur kepentingan politik. *Roadmap Making Indonesia 4.0* memberikan strategi dan arah yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang.

Kementerian Perindustrian merupakan salah satu instansi pemerintah pusat yang wajib melakukan gerakan *Making Indonesia 4.0*. Dalam rangka mencapai tujuan program *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian perlu membangun industri yang berdaya saing. Dengan adanya daya saing menjadi salah satu kriteria yang menentukan keberhasilan suatu negara di dalam perdagangan internasional. Dalam era perdagangan bebas saat ini, daya saing sebuah produk menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agar produk tersebut dapat bertahan di pasar internasional (Karlinda & Hutagaol, 2012). Oleh karena itu, peningkatan daya saing perlu memerhatikan dua faktor utama, keunggulan kompetitif dan komparatif (Wardani & Mulatsih, 2018).

Making Indonesia 4.0 telah memfokuskan di lima sektor manufaktur, di antaranya ialah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, kimia, otomotif, dan elektronik. Kelima sektor industri tersebut diharapkan dapat menjadi pionir implementasi Industri 4.0 yang memberikan kontribusi nyata pada perekonomian di Indonesia. Schulz (2020) berpendapat bahwa pengolahan komoditas industri merupakan sektor penyokong ekonomi yang paling menjanjikan. Misalnya, sektor industri tekstil dan pakaian ditargetkan menjadi *produsen functional clothing* terkemuka. Pada bidang kimia berupaya memperluas kapasitas dan membangun kemampuan sektor kimia menjadi *net* eksportir dan produsen bahan kimia spesialis, sedangkan pada bidang otomotif dan elektronik berupaya menjadi produsen mobil terbesar di ASEAN dan basis produksi *Internal Combustion Engine* (ICE) maupun *Electrified Vehicle* (EV) serta mengembangkan kemampuan industri domestik sektor elektronik.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perluasan penerima program bantuan untuk pembelian motor listrik roda dua. Kebijakan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin nomor 6 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua. Dasar utama perubahan kebijakan tersebut, yakni percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih. Seiring dengan perkembangan kendaraan listrik yang semakin pesat, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan kebijakan *making 4.0*, disertai dukungan pemerintah dari membangun pabrik baterai lithium di Karawang dan Sulawesi Selatan serta pengurangan biaya masuk kendaraan hingga pengurangan pajak khusus kendaraan listrik.

Seperti yang kita ketahui di Indonesia motor listrik belum sepopuler motor konvensional (Said et al., 2022). Di sisi lain, penjualan motor roda dua di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan peluang motor listrik juga bisa berkembang sangat besar terutama di daerah perkotaan. Masyarakat perkotaan terbiasa mengikuti perkembangan teknologi dan peduli akan keramahan lingkungan sehingga motor listrik lebih bisa diterima.

Motor listrik yang beredar saat ini memiliki daya saing yang kurang terhadap pasar nasional. Kurang sesuainya konsep, kebutuhan dan pengetahuan tentang motor listrik membuat motor listrik kurang diminati oleh masyarakat di Indonesia. Masih banyak konsumen yang meragukan potensi tenaga listrik, ditambah dengan permasalahan desain yang kurang menarik sesuai serta harga untuk satu unit motor listrik roda dua yang dinilai cukup mahal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh produsen motor listrik ialah dengan menciptakan inovasi produk ramah lingkungan guna menanggulangi

fenomena *global warming*. Produsen hanya terfokus pada teknologi kendaraan sepeda motor listrik roda dua sehingga banyak masyarakat merasa kurang puas dengan desain dari kendaraan yang monoton. Ini berbanding terbalik dengan desain sepeda motor konvensional yang memiliki desain lebih baik dan lebih bervariasi. Berdasarkan fenomena di atas, penilaian efektifitas dalam proses pelaksanaan suatu regulasi menjadi penting karena untuk mengetahui ketercapaian tujuan regulasi (Santoso & Jati, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini mendiskusikan masalah pemberian subsidi pembelian motor listrik roda dua untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penggunaan data berbentuk kata-kata yang mengandung makna, berupa fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuan pendekatan ini dalam memahami fenomena yang kompleks dan unik (Hall & Liebenberg, 2024). Penelitian deskriptif kualitatif menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi, bertujuan menggambarkan peristiwa beserta ciri-cirinya (Nassaji, 2015). Pertanyaan penelitian juga berfokus pada penemuan siapa, apa, dan di mana peristiwa tersebut untuk memberikan wawasan yang lebih baik terkait fenomena yang kurang dipahami (Kim et al., 2017).

Selain itu, penelitian kualitatif menggambarkan gejala sosial ini dengan mendeskripsikan berbagai fenomena sosial yang ada (Slamet, 2006). Penelitian ini menggambarkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberian subsidi pembelian sepeda motor roda dua dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Penelitian ini didukung dengan data literatur terkait masalah subsidi sepeda motor listrik dan penjualan sepeda motor listrik. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan berbagai dokumen kebijakan, peraturan

dan perundang-undangan berkaitan dengan pemberian subsidi, maupun data terkait dengan penggunaan sepeda motor listrik roda dua di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan subsidi bertujuan menciptakan insentif yang tepat bagi setiap penerima manfaat (Srinivasan, 2009). Dalam konteks ini, pemerintah memberikan subsidi dalam pembelian motor listrik dan juga mobil listrik. Pemberian subsidi adalah bantuan untuk pembelian melalui potongan harga sebesar Rp 7.000.000 dari harga normal. Masyarakat yang menerima subsidi juga telah ditentukan oleh pemerintah. Berikut ini adalah daftar harga motor listrik yang mendapatkan subsidi dari pemerintah:

Tabel 1. Harga Motor Listrik

No	Merk Motor Listrik Roda Dua	Harga
1	Motor listrik Tangkas V8	16.100.000
2	Motor listrik Tangkas E6	10.200.000
3	Motor listrik Tangkas X7	19.800.000
4	Motor listrik Tangkas P6	13.800.000
5	Motor listrik Volta 401	17.600.000
6	Motor listrik Volta Virgo	18.400.000
7	Motor listrik Volta Lite Virgo	14.400.000
8	Motor listrik Volta Lite 401	15.000.000
9	Motor listrik Volta Lite Mandala	14.500.000
10	Motor listrik Smoot Tempur	18.500.000
11	Motor listrik Gesits	29.400.000
12	Motor listrik Gesits Raya	28.400.000

Subsidi pembelian motor listrik roda dua yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui produsen berfungsi untuk meningkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bertenaga listrik. Sepeda motor listrik roda dua merupakan kendaraan yang 100% menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga. Sepeda motor listrik dari segi efisiensi, perawatan dan potensi mesin mampu dalam jangka waktu

panjang yang memiliki keunggulan lebih sehingga dengan berkembangnya teknologi sepeda motor listrik ini dapat bersaing dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Laucereno (2023) menjelaskan bahwa sektor industri otomotif di Indonesia saat ini berlomba-lomba dan terus berupaya dalam pengembangan dan membuat inovasi sepeda motor listrik ramah lingkungan sebagai alternatif motor berbasis *Internal Combustion Engine* (ICE) dengan meningkatkan investasi dalam aspek riset dan pengembangan, pemasaran serta infrastruktur.

Sepeda motor listrik roda dua memang tergolong masih jarang digunakan oleh masyarakat sebagai alat transportasi sehari-hari. Konsep dari sepeda motor listrik ini untuk menyediakan kendaraan terjangkau, aman, andal, inovatif, dengan suku cadang dari dalam negeri. Inovasi meluas ke baterai yang dapat diisi dalam waktu dua jam. Adanya dukungan pengisian baterai yang relatif cepat akan semakin memangkas waktu pengisian menjadi sekitar satu jam. Pertumbuhan daya beli konsumen terhadap sepeda motor listrik dari tahun ke tahun sudah mulai meningkat. Mukhlis dan Judianto (2017) memaparkan bahwa sepeda motor listrik yang didesain yang lebih menarik akan dapat menarik peminat terhadap pembelian motor listrik yang ramah lingkungan.

Sepeda motor listrik roda dua dapat menjadi salah satu alternatif solusi ramah lingkungan untuk menurunkan tingkat emisi karbon. Hal tersebut disebabkan karena sepeda motor listrik roda dua memiliki efisiensi yang lebih tinggi sehingga dapat meminimalisir konsumsi energi dan menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional pada umumnya. Negara Indonesia telah menegaskan komitmen untuk berupaya mengurangi emisi karbon dan menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan target *Enhanced Nationally Determined Contribution* (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton karbon dioksida (CO₂) pada tahun 2030. Tindakan tersebut ditegaskan

melalui Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (kementerian KLHK, 2023). Di sisi lain target tersebut lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu pengurangan emisi karbon 29% atau setara dengan 835 juta ton CO₂. Dengan adanya komitmen tersebut dan seiring dengan perkembangan zaman, sektor industri otomotif di Indonesia saat ini lebih mengedepankan aspek teknologi dan desain yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam strategi untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 dan mulai lebih cepat melakukan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke LNG, mengurangi pembangkit berbahan bakar batu bara dan konversi kendaraan bermotor menjadi listrik (Wigati, 2011).

Mulai tahun 2022 Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa peraturan dan kebijakan supaya harga motor listrik semakin murah dan makin menarik masyarakat untuk memilikinya. Kebijakan subsidi motor listrik diberikan pada produk yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), di mana aturan penggunaan bahan baku lokal dalam produksi produk adalah minimal 25% (Fikri et al., 2023). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional di tengah kondisi perdagangan dunia yang cenderung tertutup (Susanti et al., 2021). Pemerintah Indonesia sangat yakin bahwa penjualan sepeda motor listrik akan meningkat beberapa tahun ke depan. Berbagai macam upaya mempermudah akses kepemilikan sepeda motor listrik telah dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk transportasi sehari-hari. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk menarik minat masyarakat (Asim, 2023). Hal ini menjadi strategi dalam meningkatkan

partisipasi pemerintah sebagai elemen penting dalam implementasi kebijakan (Ranjani et al., 2023). Asim (2023) menyampaikan bahwa percepatan pengembangan industri kendaraan elektrifikasi berbasis baterai, pemberian insentif, penyediaan infrastruktur pengisian listrik, dan pengaturan tarif hingga perlindungan terhadap lingkungan hidup adalah strategi dalam meningkatkan minat masyarakat.

Subsidi pembelian motor listrik bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik. Namun pada kenyataannya penjualan sepeda motor listrik roda dua di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan penjualan sepeda motor konvensional dengan teknologi pembakaran internal. Hasil kajian menemukan bahwa penjualan sepeda motor listrik dari 2019 hingga 2022 hanya mencapai 30.837 unit, sementara untuk kendaraan roda dua dengan sistem pembakaran konvensional telah mencapai 29 juta unit (Laucereno, 2023). Kepolisian Republik Indonesia mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah mencapai 126,99 juta unit atau 83,27% dari total kendaraan bermotor (Asmoro, 2023). Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan produktivitas masyarakat jumlah tersebut tentu diperkirakan akan terus bertambah.

Subsidi pembelian motor listrik dan inovasi motor listrik sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Sebab dengan pemberian subsidi pembelian motor listrik maka masyarakat akan dapat dengan mudah membeli motor listrik roda dua dengan harga terjangkau untuk keperluan transportasi yang dapat meningkatkan penghasilan sektor industri otomotif sehingga otomatis pendapatan sektor industri bidang otomotif dan elektronik pun meningkat. Selain fokus pada pemberian subsidi pembelian motor listrik, pemerintah juga perlu mempertimbangkan strategi dan kebijakan berdasarkan pola perilaku dan persepsi masyarakat terhadap motor listrik. Meningkatnya keinginan masyarakat untuk

membeli motor listrik dipengaruhi oleh persepsi seperti manfaat terhadap lingkungan, manfaat ekonomi dan persepsi risiko.

Begitupun dengan inovasi motor listrik roda dua, inovasi dapat memberikan pilihan kepada masyarakat dalam memilih sepeda motor dengan spek yang lebih canggih sehingga dapat menunjang kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemberian subsidi dan inovasi motor listrik roda dua dapat meningkatkan daya beli masyarakat di perkotaan sehingga upaya pemerintah Indonesia menjadi menjadi produsen mobil terbesar di ASEAN dan basis produksi *Internal Combustion Engine* (ICE) maupun *Electrified Vehicle* (EV) serta mengembangkan kemampuan industri domestik sektor elektronik akan terwujud.

KESIMPULAN

Kebijakan pemberian subsidi pembelian motor listrik roda dua merupakan keseriusan dan dukungan nyata dari Pemerintah Indonesia dan dorongan kerjasama dari seluruh pihak terkait. Dengan dikeluarkannya kebijakan dari Kementerian Perindustrian, ke depannya sangat diharapkan dapat meningkatkan nilai jual sepeda motor listrik dengan penyesuaian terhadap pengguna, yaitu masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengguna sepeda motor listrik dan dapat bersaing di pasaran. Sepeda motor listrik memang didesain dan dirancang menyesuaikan konsep masyarakat saat ini, konsep tersebut cenderung minimalis, *simple* dan futuristik serta tentunya lebih ramah lingkungan. Penggunaan konsep ramah lingkungan merupakan upaya keseriusan pemerintah dalam menjalankan strategi untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada 2060 sehingga perlu usaha untuk mempermudah masyarakat dalam upaya konversi kendaraan bermotor menjadi listrik.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliyanto, A. P. (2021). Evaluasi Kebijakan Sabilulungan 1000 Kampung Kabupaten Bandung. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi*

- Publik*, 3(1), 23–42.
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11360>
- Aryani, L., & Tambunan, M. R. U. D. (2022). Catatan Atas Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2).
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i2.14893>
- Asim, M. (2023). Tak cuma soal harga, persepsi konsumen soal kendaraan listrik belum cukup kuat dorong adopsi motor setrum. *Theconversation.Com*.
- Asmoro, P. (2023). Populasi dan Perkembangan Kendaraan di Indonesia Tercatat Lebih Dari 150 Juta di Tahun 2022. *Trenasia.Com*.
<https://www.trenasia.com/populasi-dan-perkembangan-kendaraan-di-indonesia-tercatat-lebih-dari-150-juta-di-tahun-2022>
- Banu, Prasetyo, & Umi, Trisyanti. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. *Prosiding SEMATEKSOS 3: Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0*.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>
- Fikri, M. A., Darsih, D., & Amalia, D. R. (2023). Data Visualization and Forecasting Domestic Component Level (TKDN) Indonesian Ministry of Industry Using Power Business Intelligence. *E3S Web of Conferences*, 448, 02003.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344802003>
- Hall, S., & Liebenberg, L. (2024). Qualitative Description as an Introductory Method to Qualitative Research for Master's-Level Students and Research Trainees. *International Journal of Qualitative Methods*, 23.
<https://doi.org/10.1177/16094069241242264>
- Karlinda, F., & Hutagaol, M. P. (2012). Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Ekspor Mutiara

- Indonesia [IPB University].
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/60753>
- Kawai, M., & Wignaraja, G. (2007). *ASEAN+3 or ASEAN+6: Which Way Forward?*
<http://hdl.handle.net/11540/3665>
- Kementerian KLHK. (2023). *Perdagangan Karbon Untuk Pencapaian Target NDC, Kontribusi Indonesia Bagi Agenda Perubahan Iklim Global*.
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Research in Nursing & Health*, 40(1), 23–42.
<https://doi.org/10.1002/nur.21768>
- Laucereno, S. F. (2023). Gencar Subsidi, Bagaimana Trend Penjualan Motor Listrik? *DetikFinance*.
<https://finance.detik.com/energi/d-6874448/gencar-subsidi-bagaimana-trend-penjualan-motor-listrik>
- Mukhlis, A., & Judianto, O. (2017). Kajian Teknologi Pada Sepeda Motor Bertenaga Listrik. *Journal Inosains*, 12(2), 36–41.
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/inosains/article/view/3001/2504>
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), 129–132.
<https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Ranjani, R., Trianfano, A. T., Agustina, A. A., Permana, D. A., & Sari, I. N. (2023). Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Open Defecation Free (ODF) di Desa Meri Kabupaten Purbalingga. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2).
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949>
- Said, F. A., Adiluhung, H., & Pujiraharjo, Y. (2022). Perancangan Sepeda Motor Listrik Untuk Masyarakat Urban Dipertanian. *E-Proceeding of Art & Design*, 491–507.
- Santoso, S., & Jati, N. C. K. R. (2020). Analisis Ketepatan Kebijakan Pembinaan UMKM di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 33–50.
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8270>
- Schulz, N. (2020). The politics of export restrictions: A panel data analysis of African commodity processing industries. *World Development*, 130, 104904.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104904>
- Srinivasan, S. (2009). Subsidy policy and the enlargement of choice. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 13(9), 2728–2733.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.06.005>
- Susanti, V., Sudiby, H., Subekti, R. A., Pikra, G., Pramana, R. I., Purwanto, A. J., Devi, M. I., Syukri, A. F., & Saputra, R. P. (2021). Domestic component level analysis for multipurpose autonomous robot. *Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology*, 12(2), 87–94.
<https://doi.org/10.14203/j.mev.2021.v12.87-94>
- Venti, Eka Satya. (2018). *Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0*.
- Wardani, M. A., & Mulatsih, S. (2018). Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ekspor Ban Indonesia ke Kawasan Amerika Latin. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 6(1), 81–100.
<https://doi.org/10.29244/jekp.6.1.2017.81-100>
- Wigati, S. (2011). Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maliyah*, 01(01), 22–39.
<https://media.neliti.com/media/publications/147907-ID-perilaku-konsumen-dalam-perspektif-ekono.pdf>